

Ada Korupsi di RS Bengkayang?

Hasil Audit BPK 2010

BENGKAYANG-Ada indikasi korupsi pada Rumah Sakit Bengkayang tahun 2010 lalu. Hal itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pontianak tahun 2010.

Demikian diungkapkan Ketua Lumbung Pemuda Peduli Kabupaten Bengkayang (LP2KB), Andri Froniko, kepada Pontianak Post, kemarin. Andre memaparkan beberapa point hasil audit BPK tersebut.

Pertama, kata dia, dana Jamkesmas dari Menkes sebesar Rp1,4 miliar lebih. Sementara, kata dia, dana yang telah diklaim tahun 2010 sebesar Rp1,5 miliar lebih.

"Dimana dana tersebut dari dana jasa pelayanan kesehatan tahun 2009 sebesar Rp69.400.000 ditambah dana jamkesmas dari Menkes Rp1.494.725.000). Dana klaim tahun 2010 sebesar Rp393.458.508 baru bisa dicairkan tahun 2011.

Jadi, total keseluruhan pendapatan dari dana jamkesmas tersebut

sebesar Rp1,1 miliar lebih. Belum disajikan pada pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang sebagai retribusi pelayanan Rp1.565.158.176-Rp393.458.508 = Rp1.171.699.668.

Sementara, dari pihak RSUD Bengkayang tidak melakukan penyeteroran ke laporan keuangan Pemda Bengkayang. Dasar mereka menggunakan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 51," kata Andre.

Diakui, sampai hari ini RSUD Bengkayang belum mengantongi status

◆ *Ke Halaman 23 kolom 1*

Ada Korupsi di RS Bengkayang?

Sambungan dari halaman 17

BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). "Hal tersebut telah diatur pada PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)," kata dia menjelaskan. Masalah lain diungkap adalah masalah retribusi jasa pelayanan. Menurut dia, target retribusi jasa pelayanan sebesar Rp700.000.000

yang terrealisasi sebesar Rp1.270.617.000.

"Sementara, data yang kita peroleh dari pihak RSUD Bengkayang yang ditandatangani oleh bendaharapenerima tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.193.378.000. Jadi, beda dana tersebut sebesar Rp77.239.000 (1.270.617.000 - 1.193.378.000)," kata dia. Ketiga, diungkapkannya anggaran penyediaan jasa ad-

ministrasi/teknis perkantoran sebesar Rp191.426.901 yang melebihi ketentuan dan belum didukung bukti. Tak hanya itu, realisasi honorarium pegawai honor/tidak tetap melebihi anggaran sebesar Rp22.106.000 (subsidi silang dan atas intruksi Direktur RSUD Bengkayang).

"Selain itu, realisasi insentif hasil retribusi jasa pelayanan kesehatan melebihi keten-

tuan sebesar Rp924.466.199," katanya.

Untuk itu, dia minta kepada penegak hukum untuk menyelusuri dugaan indikasi korupsi di tubuh rumah sakit pemerintah tersebut. "Bila memang ada indikasi korupsi, maka hendaknya penegak hukum tidak segan-segan untuk menyeret para pelaku ke meja hijau," kata Andre menjelaskan. (zrf)